



Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bongan Kabupaten Banggai Laut

Herni Djohanis¹ Ni Luh Titi Indayani²

¹Herni Djohanis, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk Email: hdjohanis@gmail.com

²Ni Luh Titi Indayani, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk Email: niluhyani48@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bongan Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan *purposive sampling*, jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bongan Kabupaten Banggai Laut sudah berperan di lihat dari empat sub variabel peran secara keseluruhan, tetapi masih ada peran yang belum terlaksana dengan maksimal pada peran pemerintah sebagai dinamisor, pada indikator pembentukan kelompok pemberdayaan Nelayan Di Desa Toropot, ditemui bahwa pemerintah Desa masih mengutamakan keluarga untuk diangkat sebagai pengurus kelompok pemberdayaan Nelayan, kurangnya bimbingan dari pihak pemerintah Desa terhadap pemberdayaan, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah Desa Toropot sehingga menyebabkan banyak bantuan alat tangkap ikan yang tidak digunakan tetapi di jual tanpa sepengetahuan pemerintah Desa.

Kata Kunci : *Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat*

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the role of the village government in empowering the fishing community in Toropot Village, Bongan District, Banggai Laut Regency. This study is based on the researcher's curiosity about the role of the village government in empowering the fishing community. This study is a qualitative descriptive study using purposive sampling technique with 8 informants. Data collection techniques were taken from interviews and observations, which were then described descriptively to obtain valid and accountable research results.

The results obtained in this study show that the role of the village government in empowering the fishing community in Toropot Village, Bongan District, Banggai Laut Regency has been effective in terms of the four sub-variables of the role as a whole, but there are still roles that have not been fully implemented in the role of the government as a dynamizer. In the indicator of the formation of a fishing community empowerment group in Toropot Village, it was found that the village government still prioritizes families to be appointed as administrators of the fishing community empowerment group, there is a lack of guidance from the village government regarding empowerment, and there is weak supervision from the Toropot Village government, resulting in many fishing equipment aids not being used but sold without the knowledge of the village government.

Keywords: *Village Government, Empowerment, Community*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan "(*archipe-lagic state*)" atau juga disebut dengan Negara Maritim, terbesar nomor satu di dunia yang terbentang dari Sabang hingga Marauke. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 pada bagian menimbang poin (a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A yang berbunyi "bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

Dilanjutkan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi "Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengorganisasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau kecil yang dilakukan pemerintah dan pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di wilayah Desa Toropot, sebagian besar masyarakat yang tinggal di berasal dari suku yang berbeda-beda, mereka hanya mengandalkan kerja keras atau nelayan untuk mencari nafkah, sehingga sebagian besar mereka tinggal di wilayah pesisir, memiliki perbedaan dalam hal kehidupan sedangkan perbedaan masyarakat pedesaan disebabkan oleh faktor alam karena masyarakat Desa Toropot lebih dekat dengan laut. Desa Toropot merupakan salah satu lingkungan yang ada di Kecamatan Bokan letaknya sangat baik dilakukan kegiatan tangkap ikan, karena letaknya yang bagus di pesisir pantai sehingga sangat bagus untuk kegiatan penangkapan ikan bagi yang bekerja atau seorang nelayan. Lokasi Desa Toropot ialah suatu tempat penghasil di bidang perikanan, pertanian dan kelautan.

Memberdayakan masyarakat nelayan di Desa Toropot sangatlah penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah beserta perangkatnya, karena mereka sangat berperan penting untuk memberdayakan masyarakatnya, dimana seperti, mendorong dan memotivasi mereka untuk menentukan pola pilihan kehidupannya. Pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknyamenurut undang-undang (Hikmat, 2006). Sementara itu menurut Suharto (2005) Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

Berdasarkan fenomena di lapangan menggambarkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bokan Kabupaten Banggai Laut terdapat beberapa permasalahan, diantaranya bahwa yang dirasakan masyarakat nelayan ini adalah kurangnya perhatian dari pemerintah Desa Toropot dalam hal memberdayakan masyarakat nelayan, padahal itu yang sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan yang dialami nelayan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Imanuel, 2015) Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara

struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut R. Mac Iver dalam (Nurman, pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Ratnawati & Nasehudin, 2019). Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada Penelitian adalah Metode deskriptif Kualitatif, menurut Sugiyono, Metode Penelitian deskriptif yaitu metode Penelitian yang digunakan untuk menggambarkan untuk memaparkan keadaan objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan kondisi Penelitian dilakukan, tanpa bermaksud menguji hipotesis atau membuat kesimpulan yang berlaku umum (Abdussamad 2021). Penelitian ini bertempat di Desa Toropot Kecamatan Bongan Kabupaten Banggai Laut. Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi penelitian dikarenakan menurut peneliti Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bongan Kabupaten Banggai Laut belum maksimal, hal inilah yang menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelusuran lebih mendalam lagi dalam bentuk penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek Penelitian adalah Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bongan Kabupaten Banggai Laut. Adapun dalam penelitian ini, yang dijadikan obyek Penelitian adalah Aparat Desa Toropot, BPD Desa Toropot dan Masyarakat Nelayan. Dalam penelitian ini penulis menemukan informan penelitian berjumlah 8 orang. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, BPD dan Masyarakat. Dalam penelitian Kualitatif. Teknik sampling yang digunakan digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel

sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

HASIL & PEMBAHASAN

Pemberdayaan adalah upaya mencapai kompetensi dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Pemberdayaan masyarakat harus mengarah pada persepsi masyarakat yang lebih baik. Pengkondisian kognitif pada dasarnya adalah kemampuan berpikir berdasarkan pengetahuan dan wawasan pribadi atau sosial untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Pengkondisian aktif adalah pengembangan sikap perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi efektif adalah pemahaman tentang apa yang dimiliki masyarakat dan harapan intervensi untuk mencapai pemberdayaan sikap dan perilaku. Kompetensi psikomotor adalah keterampilan yang dimiliki masyarakat yang dirancang untuk mendukung kegiatan pengembangan masyarakat. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang hal yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bokan Kabupaten Banggai Laut meliputi:

Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa. Dalam peran pemerintah Desa Toropot sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan tentu banyak hal yang harus dipersiapkan seperti pembentukan atauran atau kesepakatan bersama, ada banyak hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan di dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Toropot, karena semua masyarakat mayoritas nelayan hal ini disebabkan letak dan potensi Desa yang ada. Dalam pembentukan pemberdayaan di Desa toropot perlu adanya sosialisasi yang maksimal hal ini mampu memberikan gambaran dan edukasi kepada masyarakat desa Toropot terkait proses pemberdayaan nelayan yang ada.

Penetapan aturan program pemberdayaan

Dalam peran pemerintah sebagai regulator tentu ada penetapan aturan yang harus disepakati sebelum pemberdayaan itu dilaksanakan secara menyeluruh, Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa. Pemberdayaan nelayan di Desa

Toropot telah mengacu pada peraturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Peraturan inilah yang diterapkan di Desa Toropot sebagai acuan umum dalam kebijakan pemberdayaan nelayan di Desa Toropot. Kemudian pemerintah Desa buat kesepakatan tertentu dalam Desa tetapi landasannya adalah undang-undang No.7 Tahun 2016.

Sosialisasi

Sosialisasi dalam pemberdayaan nelayan di desa Toropot dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami maksud dan tujuan serta mekanisme serta alur pemberdayaan. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa. Dalam sosialisasi masyarakat mendapatkan edukasi tentang pemberdayaan Nelayan di Desa Toropot, masyarakat Desa Toropot banyak mengikuti sosialisasi namun kebanyakan masyarakat hanya mendengarkan saja tanpa bertanya artinya masyarakat Desa Toropot masih belum aktif dalam proses sosialisasi.

Pemerintah sebagai dinamisor

Peran pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa. Sebagai dinamisor, pemerintah berperan melalui pembentukan kelompok, pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu yang dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat Desa Toropot. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya di Desa Toropot, itu tidak lepas dari peran Dinas Kelautan dan Perikanan dan pemerintah Desa setempat yang menjadikan masyarakat nelayan sebagai aktor utama dalam pemberdayaan guna untuk meningkatkan usaha dan penghasilan nelayan.

Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Nelayan

Pembentukan kelompok pemberdayaan nelayan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan nelayan dengan tujuan menjadikan masyarakat lebih mandiri, memiliki keterampilan yang lebih baik. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa. Pembentukan kelompok nelayan tentu

melalui musyawarah bersama, dan identifikasi. Setiap kelompok yang dibentuk anggotanya bervariasi ada yang 15 orang 18 orang bahkan ada yang sampai 20 orang. Beberapa nelayan sudah sadar akan pentingnya kelembagaan jadi mereka semakin giat dalam membentuk kelompok. Nelayan berkumpul dalam suatu wadah, untuk mempermudah penyaluran bantuan, semua ini adalah upaya untuk memperdayakan masyarakat nelayan di Desa Toropot. Kelemahan dari pada pembentukan kelompok nelayan di Desa Toropot masih terdapat adanya sistem kepentingan keluarga, dimana rata-rata pengurus anggota kelompok merupakan keluarga para aparat Desa.

Bimbingan

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (perorangan atau kelompok) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal guna untuk memahami lingkungan, mengatasi hambatan dalam menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu dan kelompok. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara di atas yaitu bahwa. Pemerintah Desa Toropot terus berupaya menggenjot peningkatan hidup para pelaku perikanan dalam hal ini nelayan yang berada di Desa Toropot, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan nelayan, dengan membantu mengarahkan Dinas dan tim penyuluhan memberikan bimbingan teknis (BIMTEK) untuk masyarakat Desa Toropot. Desa telah melakukan perannya, namun bimbingan ini terkadang tidak efektif karena hanya dilakukan beberapa kali.

Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara di atas yaitu bahwa. Sebagai fasilitator, pemerintah Desa berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman, dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana kelompok Nelayan Di Desa Toropot. Pemerintah Desa sudah memfasilitasi masyarakat Desa Toropot dengan membantu agar masyarakat memperoleh bantuan dari pemerintah daerah seperti modal awal dan pelatihan ini menunjukan antusias pemerintah Desa dan perannya sangat maksimal.

Bantuan permodalan

Bantuan permodalan nelayan merupakan hal yang paling vital untuk menentukan kemajuan dan peningkatan pemberdayaan nelayan di setiap Desa. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa. Bantuan yang di peroleh oleh masyarakat bukan berupa dana tunai tapi berupa peralatan menangkap ikan seperti perahu, jala dan berbagai alat tangkap ikan hal bertujuan agar masyarakat Desa Toropot mampu meningkatkan daya tangkapan ikan sehingga lebih meningkat hasilnya dan sangat berdampak pada pendapatan ekonomi.

Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa. Pelatihan merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa melalui menyelenggarakan pemberdayaan nelayan. wajib memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan. Pelatihan tersebut bagi nelayan dimaksudkan untuk memberikan berbagai pengetahuan seputar bagaimana menangkap dan pembudidayaan hasil perikanan. masyarakat mendapatkan pelatihan bagaimana cara mengelola hasil perikanan dan bagaimana memanfaatkan hasil perikanan dan juga meningkatkan pendapatan hasil perikanan, masyarakat merasa senang dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Pemerintah Sebagai motivator

Peran pemerintah sebagai motivator yaitu fungsi pemerintah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa Pemerintah sebagai motivator dalam pemberdayaan tentu harus mengawasi jalannya program pemberdayaan yang ada sehingga tidak terjadi penyimpangan dan selalu membimbing setiap kelompok pemberdayaan di Desa Toropot, peran sebagai motivator sudah berperan hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah selalu melakukan pengawasan kegiatan dan pembimbingan.

Pengawasan pemberdayaan

Pengawasan pemberdayaan merupakan segala upayah untuk memantau, mengendalikan, dan menegakan berbagai aturan dibidang kelautan dan perikanan tujuannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa. Pengawasan yang pemerintah lakukan hanya berupa kunjungan singkat kepada setiap kelompok yang ada di Desa Toropot tetapi

pengawasan yang di lakukan belum terjadwal secara menyeluruh, Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan belum maksimal karena masi terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat seperti ada masyarakat yang menjual berbagai alat tangkap ikannya ke masyarakat lain padahal mereka dibantu dengan melalui pemberdayaan dalam Desa.

Pendampingan

Pendampingan merupakan proses mendampingi masyarakat Desa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang dapat ditarik dari wawancara diatas yaitu bahwa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dan sangat berperan melakukan pemberdayaan melalui kegiatan pendampingan. Tetapi dalam pelaksanaannya, partisipasi dan tingkat kesadaran nelayan untuk mengikuti kegiatan pendampingan masih kurang. Hal ini dikarenakan dengan masyarakat yang terkendala dengan waktu sehingga kurangnya partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bokan Kabupaten Banggai Laut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pada peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan sudah berperan dimana pada indikator penetapan aturan pemberdayaan dan sosialisasi dilaksanakan dengan maksimal. Pada peran pemerintah sebagai dinamisator bisa dikatakan belum berperan dengan maksimal karena pada indikator pembentukan kelompok pemberdayaan Nelayan Di Desa Toropot, ditemui bahwa pemerintah Desa masi mengutamakan keluarga untuk diangkat sebagai pengurus kelompok pemberdayaan Nelayan, kemudian kurangnya bimbingan dari pihak pemerintah Desa terhadap pemberdayaan nelayan.

SARAN

1. Pemerintah Desa Toropot wajib meningkatkan pendampingan, bimbingan dan pengawasan pemberdayaan Nelayan
2. Pemerintah Desa wajib membangun kerjasama dengan Dinas perikanan dan kelautan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nelayan di Desa Toropot
3. Masyarakat nelayan Desa Toropot harus memanfaatkan dengan maksimal bantuan pemberdayan Nelayan untuk meningkatkan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. I. ed. Patta Rappanna. Makassar: Syakir Media Press.

- Hikmat A, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press. 240 hlm
- Imanuel, F. C. (2015). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Ilmu Pemerintahan.
- Muhammad Nurman. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Di Kepengenhuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokal Hilir. Universitas Riau. Pekanbaru
- Ratnawati, E., & Nasehudin. (2019). Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Membedayakan Ekonomi Kreatif Masyarakat. Edueksos.
- Sejono Soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers
- Suharto E, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.